

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pariwisata merupakan kegiatan fenomena ritual inversi. Ritual inversi adalah kecenderungan seseorang untuk mengunjungi tempat baru yang berbeda dari lingkungan atau tempat biasa mereka tinggal dalam waktu sementara, bertujuan untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru, atau sekedar melepaskan kepenatan. Oleh karena itu, wisatawan akan cenderung mencari tempat-tempat yang indah, unik, serta berbeda dari tempat biasanya mereka hidup untuk sementara (Hermawan, 2017). *World Tourism Organization* (WTO) mendefinisikan wisata adalah orang yang melakukan perjalanan untuk kesenangan dalam periode waktu tertentu.

Pariwisata merupakan sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian. Untuk menjadikan sektor ini berhasil, maka diperlukan kemampuan dalam mengelola aset pariwisata yang ada, baik aset berbentuk kekayaan alam maupun budaya. Keberhasilan kepariwisataan tidak hanya menjadikan target utama menarik wisatawan asing untuk datang, tetapi lebih untuk mengembangkan peluang usaha-usaha masyarakat didalamnya agar berkembang dan maju. Secara sederhana, partisipasi merupakan sebuah proses dimana masyarakat sebagai stakeholders terlibat mempengaruhi dan mengendalikan pembangunan di tempat mereka masing-masing. Masyarakat ikut serta secara aktif dalam memprakarsai kehidupan mereka, melalui proses

pembuatan keputusan dan perolehan sumberdaya dan penggunaannya (Suganda, 2018).

Pengelolaan pariwisata tidak hanya tentang kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan, daya tarik dan ciri khas tersendiri suatu objek wisata, serta kelompok sosial maupun komunitas yang bersangkutan dengan objek wisata, namun bisa saja pengelolaan suatu objek wisata juga terdapat aktivitas lain yang dapat mendukung dalam sektor ekonomi suatu daerah. Pengelolaan suatu objek wisata bukan hanya seputar pengembangan serta pemanfaatan daya tarik wisata itu sendiri melainkan bagaimana dalam pengelolaannya pemerintah maupun masyarakat selaku pelaksana mampu menjaga kelestarian alam, kemajemukan budaya, adat istiadat serta agama (Safitri, 2019).

Sebagai tujuan pariwisata, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menjadikan Bukit Lawang sebagai sebuah industri, bahkan menjadi objek wisata primadona bagi Pemerintah Kabupaten Langkat yang dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (Hasibuan, 2017). Kontribusi Pendapatan Asli Daerah itu diperoleh dari tiket masuk kawasan, pajak hotel dan restoran serta retribusi jasa lainnya. Dengan demikian, objek wisata Bukit Lawang sudah terintegrasi dengan syarat-syarat pariwisata lainnya, seperti jasa wisata, jaringan transportasi, akomodasi dan pemasaran, walaupun belum sempurna terutama akibat dampak banjir bandang pada November 2003 lalu (Anggia, 2022).

Bukit Lawang sebagai wisata konservasi yang merupakan konservasi nasional yang berada di kawasan hutan lindung Taman Nasional Gunung Leuseur Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dan telah menjadi salah satu obyek alam

yang sangat menarik. Kabupaten Langkat merupakan salah satu tujuan daerah wisata Provinsi Sumatera Utara. Konservasi ini memiliki karakteristik khusus yaitu dihuni oleh Orangutan Sumatera (*Pongo abelii*). Berbagai perundang-undangan yang mengatur konservasi keanekaragaman hayati yang telah diberlakukan tertuang dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati beserta Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 tentang pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Orangutan telah menjadi salah satu objek wisata yang menarik. Orangutan merupakan salah satu satwa yang menjadi ciri khas Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Orangutan di Pulau Sumatera memiliki nama latin *Pongo Abelii*. Sebaran Orangutan Sumatera dulunya diperkirakan hingga ke Sumatera Barat, tetapi saat ini sebaran orangutan di habitat aslinya hanya terdapat di Aceh dan Sumatera Utara. Menurut IUCN (2019), selama 75 tahun terakhir populasi Orangutan Sumatera telah mengalami penurunan sebanyak 80%. Orangutan memiliki ketergantungan dengan kondisi hutan yang masih asri dan ekologi alam yang terjaga, serta merupakan primata *frugivorus* (hewan yang memakan buah-buahan).

**Tabel 1.1** Perkiraan luas habitat dan jumlah orangutan di sumatera

No.	Unit Habitat	Perkiraan Jumlah Orangtua	Hutan Primer (ha)	Habitat Orangutan (km)
1.	Leuser Timur Sikundur-Langkat	257	200	674

Sumber: PHVA 2004 dan Revisi PHVA 2004; Wich, dkk 2008

Orangutan Sumatera sendiri habitatnya berada di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Taman Nasional Gunung Leuser sendiri terbentang dari Provinsi

Daerah Istimewa Aceh sampai Sumatera Utara dengan luas total 1.094.692 hektare. Dan di wilayah Sumatera Utara, terdapat salah satu daerahnya yang termasuk dalam zona kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), yaitu Desa Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat. Di Desa Bukit Lawang sendiri terdapat Objek dan Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA), yaitu berupa Pusat Pengamatan Orangutan Sumatera. Hal itulah yang menjadikan Bukit Lawang menjadi Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yang berorientasi pada Orangutan.

Meskipun Bukit Lawang telah ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN), namun bukan berarti wisatawan yang berkunjung di Bukit Lawang menunjukkan angka peningkatan, jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Langkat mengalami penurunan yang cukup signifikan baik yang berasal dari wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Setiap tahunnya, angka kunjungan wisatawan selalu naik turun secara signifikan.

**Tabel 1.2 Jumlah wisatawan KPPN Bukit Lawang**

<b>Tahun</b>	<b>KPPN Bukit Lawang</b>
2017	19.843
2018	13.366
2019	12.575
2020	325
2021	1106
2022	12.885

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Langkat, 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat naik turunnya jumlah pengunjung setiap tahunnya. Banyak faktor yang mempengaruhi, antara lain terjadinya banjir bandang pada tahun 2003 dan 2020, yang juga bersamaan dengan munculnya fenomena Covid-19. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah

pengunjung Bukit Lawang yang dimana ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) selalu mengalami naik turun secara signifikan dalam 6 tahun belakangan dikarenakan pada Implementasi strategi dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi Wisata Konservasi orangutan Bukit Lawang memiliki banyak kendala.

Berbicara tentang kebijakan, Pemerintah Daerah selaku yang memiliki kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, dan tata kerja, yang tertera pada Peraturan Bupati Langkat Nomor 6 Tahun 2017 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas utama membantu Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan pengelolaan pengembangan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan. Hal tersebut didukung pula oleh wilayah yang berada di Kabupaten Langkat mempunyai suatu potensi yang cukup besar dalam bentuk daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata hasil buatan manusia. Dari potensi tersebut, dapat dilihat bahwa Kabupaten Langkat memiliki kesempatan untuk mengembangkan wilayah wisatanya guna memperlancar sektor pariwisata yang akan memajukan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Kondisi eksisting saat ini para *stakeholders* melibatkan masyarakat lokal untuk mengelola objek wisata dimaksudkan sebagai perangsang untuk mengendalikan dampak manusia pada wisata ini. Perangsang itu antara lain: menawarkan lapangan pekerjaan dalam kegiatan kepariwisataan sebagai penjaga pintu, pemandu wisata, pemilik/pengelola hotel, dan lainnya. Akan tetapi, kurangnya kesadaran dan edukasi yang diberikan kepada masyarakat sehingga

terjadinya penyimpangan dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan menjadi kendala dan akan mempengaruhi adanya kendala lain yang terjadi di lapangan (Digantara, 2022).

Pada praktiknya, melibatkan masyarakat setempat sebagai umpan balik dalam menjaga kelestarian tempat wisata dan meningkatkan daya tarik wisatawan dengan menyediakan berbagai jasa wisata yang dibutuhkan oleh wisatawan seperti hotel atau *guest house*, warung dan lainnya. Namun di lapangan terjadi permasalahan yang dimana masyarakat mendirikan bangunan tanpa adanya syarat di pinggir sungai sehingga wisata itu yang dilihat sungai, alam dan hutan sebagai *view* mahal yang dijual, pada faktanya wisatawan yang berjalan kaki tidak lagi memandang sungai namun memandang warung-warung yang didirikan masyarakat. (Diakses dari <https://www.liputan6.com>, 6 juni 2023)

Kebijakan Peraturan Bupati Langkat No.31 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang dimana tertulis struktur besarnya tarif retribusi atas pemakaian dan pemanfaatan usaha taman rekreasi dan pemandian alam dikenakan Rp. 5000/Dewasa dan Rp. 3000/Anak-anak, namun faktanya adanya penyalahgunaan kebijakan yang diatur tentang retribusi tarif masuk wisata RP.10.000/Dewasa dan Rp.5000/Anak-Anak, bahkan adanya alternatif pintu masuk lainnya yang dibuat oleh warga dengan tujuan untuk pemasukan sendiri dengan tarif yang lebih murah (Anggia, 2022).

Kesamaan dengan tarif parkir yang kebijakannya telah diatur pada Perda Kabupaten Langkat No. 01 Tahun 2012 dengan hasil musyawarah dan mufakat desa setempat pengelolaan parkir dan simpan jaga di kawasan wisata bukit lawang

Rp. 25.000/Roda 4 dan Rp. 10.000/Roda 2, namun pada faktanya dilapangan terjadi tarif parkir yang berbeda dengan kebijakan yang ditetapkan yaitu Rp. 30.000/Roda 4 dan 15.000/Roda 2. Wisatawan mengeluh dimana tarif parkir tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku, juga merasa sangat mahal apalagi tidak didukung fasilitas parkir dan keamanan yang memadai. ( Diakses dari <https://medanbisnisdaily.com/news/>, 6 Juni 2023)

Pengembangan kawasan konservasi menjadi area wisata unggulan perlu mempertimbangkan bahwa kegiatan wisata tidak boleh menyebabkan terganggunya fungsi kawasan konservasi yang diakibatkan oleh pemanfaatan yang melebihi daya dukungnya. Daya dukung kawasan objek wisata dapat menentukan kualitas kenyamanan dan kepuasan bagi wisatawan dalam menikmati objek ekowisata yang dikunjungi. Hal ini dikarenakan daya dukung kawasan berkaitan erat dengan jumlah wisatawan yang datang mengunjungi objek ekowisata tersebut (Walimbo R, 2016).

Pemerintah Pusat dan Daerah menjadikan bukit lawang sebagai objek wisata berbasis edukasi dengan memanfaatkan satwa endemik yaitu Orangutan Sumatera (*pongo abelii*) dengan menarik perhatian wisatawan dengan menyajikan daya dukung wisata konservasi ini dengan tujuan para wisatawan yang datang dapat liburan sambil mendapatkan edukasi mengunjungi ciri khas bukit lawang yaitu wisata konservasi Orangutan Sumatera (*Pongo Abelii*). Pada implementasinya, pemerintah daerah menyediakan daya dukung berupa atraksi wisata alam yang menarik sehingga dapat mengundang perhatian wisawatan untuk datang ke Bukit Lawang dengan tersedianya *rafting* (naik perahu), *tubbing* (naik

ban dalam mobil), *trekking* (jalan kaki) menelusuri Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), dan melihat pusat rehabilitasi orangutan termasuk waktu pemberian makan (*feeding time*).

Dengan adanya daya dukung atraksi wisata yang disuguhkan, kurangnya minat wisatawan untuk menelusuri wilayah konservasi sehingga tujuannya hanya sebatas merasakan wisata alamnya saja. Kurangnya sosialisasi dan promosi mengenai pusat konservasi terhadap para pengunjung, kurangnya minat wisatawan mengunjungi pusat konservasi juga dikarenakan medannya yang berada didalam hutan cukup sulit, hanya memiliki akses jalan setapak saja sepanjang 10Km, medannya yang susah untuk dijangkau, apalagi tidak dapat dilewati oleh kendaraan dan harus memiliki Surat Izin Memasuki Kawasan Konservasi (SIMAKSI) dengan biaya Rp.30.000/Orang dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan izin tersebut, sehingga menimbulkan kesulitan atau tantangan bahkan rasa malas tersendiri bagi wisatawan untuk dapat dengan mudah menjangkau dan merasakan wisata alam konservasi Orangutan (Observasi awal, 2023).

Objek wisata konservasi Bukit lawang belum tergarap secara maksimal. Beberapa kekurangan masih terlihat dalam pengelolaan wisata di kawasan pantai. Pengawasan terurama terhadap pendapatan retribusi wisata dinilai kurang maksimal. Permasalahan yang terjadi di atas dapat disimpulkan karena kurangnya sosialisasi serta perhatian pemerintah terhadap masyarakat setempat guna agen penggerak tempat wisata, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kab. Langkat harus segera menindaklanjuti permasalahan tersebut (Anggia, 2022).

Melalui permasalahan diatas, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang berkenaan dengan Pengelolaan Objek Wisata Konservasi Orangutan Sumatera (*pungo abelii*) di Taman Nasional Gunung Leuseur Bukit Lawang mengangkat judul tersebut untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pada Objek wisata konservasi orangutan di bukit lawang yang dilakukan oleh para stakeholders, juga membahas hambatan yang ada serta pengembangan berbagai lembaga terkait dalam konservasi orangutan Sumatera di TNGL Bukit Lawang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat beberapa rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan objek wisata konservasi Orangutan Sumatera (*Pongo Abelii*) di TNGL Bukit Lawang?
2. Mengapa pengelolaan objek wisata konservasi Orangutan Sumatera (*Pongo Abelii*) di TNGL Bukit Lawang terkesan terhambat?
3. Upaya pengembangan apa yang dilakukan para *stakeholders* dalam pengelolaan objek wisata konservasi Orangutan Sumatera (*Pongo Abelii*) di TNGL Bukit Lawang?

## **1.3 Fokus Penelitian**

Berdasarkan rumusan malah diatas, maka yang menjadi focus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi pengelolaan yang telah diimplementasikan oleh lembaga terkait pada objek wisata konservasi orangutan Sumatera (*Pongo Abellii*) di TNGL Bukit Lawang.
2. Mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat pengelolaan objek wisata konservasi Orangutan Sumatera (*Pongo Abellii*) di TNGL Bukit Lawang.
3. Mengkaji upaya pengembangan strategi seperti apa yang akan dilakukan oleh pada lembaga terkait mengatasi kendala yang terjadi pada wisata konservasi orangutan Sumatera (*Pongo Abellii*) di TNGL Bukit Lawang.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan dar penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Pengelolaan Objek Wisata Konservasi Orangutan Sumatera (*Pongo Abellii*) di TNGL Bukit Lawang.
  - a. Pembangunan serta pengembangan pariwisata harus berdasarkan pada kearifan lokal yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungannya.
  - b. Preservasi, proteksi dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan pariwisata.
  - c. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasan budaya lokal.
  - d. Memberikan dukungan serta legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika memberikan manfaat positif.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Pengelolaan Objek Wisata Konservasi Orangutan Sumatera (*Pongo Abellii*) di TNGL Bukit Lawang.
  - a. Faktor Internal

3. Untuk menganalisis gambaran upaya pengembangan dalam pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga terkait mengatasi kendala yang terjadi pada objek wisata konservasi orangutan Sumatera (*Pongo Abellii*) di TNGL Bukit Lawang.
  - a. Bidang Atraksi
  - b. Bidang Akseibilitas
  - c. Bidang Fasilitas

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Melalui tujuan penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah dan lembaga terkait dalam mengevaluasi pengelolaan objek wisata konservasi orangutan (*Pongo Abellii*) di Bukit Lawang.
- b. Dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai data atau pedoman pelaksanaan penelitian lebih lanjut tentang strategi pemerintah dalam mengevaluasi strategi dan kebijakan yang dilakukan pada wisata konservasi orangutan Sumatera.

### **2. Manfaat teoritis**

Hasil dari penelitian diharapkan dipergunakan sebagai masukan atau sumber informasi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dalam strategi dan kebijakan yang dilakukan pada wisata konservasi orangutan Sumatera.